

**ANALISIS KONTRIBUSI TENAGA KERJA SEKTOR  
PETERNAKAN DI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

**Achmad Firman, SPt., MSi**

**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
JUNI 2007**

## LEMBAR PENGESAHAN

### Penelitian Mandiri

- 
1. a. Judul Penelitian :  
    **“Analisis Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Peternakan di Provinsi Jawa Barat”**  
    b. Bidang Ilmu : Pertanian/Ekonomi Peternakan
- 
2. Peneliti  
    a. Nama Lengkap dan Gelar : Achmad Firman, SPt., MSi  
    b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
    c. Gol/Pangkat/NIP : IIIc/Penata /132 297 365  
    d. Jabatan Fungsional : Lektor  
    e. Jabatan Struktural : -  
    f. Fakultas/Jurusan : Peternakan/Sosial Ekonomi Peternakan  
    g. Pusat Penelitian : Universitas Padjadjaran
- 
3. Lokasi Penelitian : Indonesia
- 
4. Kerjasama dengan institusi lain : Tidak ada
- 
5. Sumber Dana : -
- 

Bandung, Juni 2007

Mengetahui  
Kepala Laboratorium Ekonomi

Peneliti

Ir. Sri Rahayu, MS  
NIP: 130 703 522

Achmad Firman, SPt., MSi  
NIP: 132 297 365

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahirobbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga paper ini yang berjudul “Analisis Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Peternakan di Provinsi Jawa Barat” dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan rasa terima kasih disampaikan kepada Kepala Laboratorium Ekonomi Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis untuk berkarya.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

**Penulis,**

# I PENDAHULUAN

## 1.1. Latarbelakang

Kegiatan investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan karena investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harrod-Domar (1957) yang dikutip oleh Jhingan (1993) mengemukakan bahwa investasi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebab investasi dapat menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Oleh karena itu, yang diharapkan dari investasi adalah dampak yang ditimbulkan dari investasi terhadap pembangunan nasional maupun wilayah. Dampak lain yang diharapkan dengan adanya investasi adalah penyerapan tenaga kerja yang bisa diserap pada sektor yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan di daerah harus mampu memilih sektor-sektor mana yang bisa dijadikan unggulan bagi daerahnya yang tentunya bisa berdampak positif bagi pembangunan wilayah, khususnya peningkatan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Berkaitan dengan investasi, maka di era otonomi daerah ini setiap wilayah harus mampu mengembangkan berbagai sektor yang potensial untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Demikian juga dengan Propinsi Jawa Barat harus mencari sumber-sumber pendapatan dari berbagai sektor yang menjadi unggulan Jawa Barat terutama dalam peningkatan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Berbagai sumber yang potensial tersebut, selanjutnya diupayakan untuk dikembangkan melalui peningkatan investasi baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Di Jawa Barat, pembangunan ekonomi regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Pembangunan Propinsi dituntut untuk melakukan reorientasi pembangunan dengan mengutamakan kekuatan inti (*core business*) perekonomian yang mempunyai prospek dalam skala regional maupun nasional. Salah satu *core business* Jawa Barat adalah bidang agribisnis dengan penetapan kawasan-kawasan yang berbasis agribisnis. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis di Jawa Barat, yaitu dengan menetapkan fokus komoditas yang akan dikembangkan dengan menetapkan komoditas unggulan serta kawasan sentra produksinya berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki oleh setiap komoditas.

Salah satu subsektor unggulan dalam bidang agribisnis di Jawa Barat adalah subsektor peternakan. Berdasarkan data lima tahun terakhir (1996 – 2000) bahwa investasi agribisnis berbasis peternakan mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga diperlukan upaya-upaya khusus untuk merangsang investasi agribisnis peternakan. Pentingnya melakukan upaya khusus ini dikarenakan sektor peternakan merupakan sumber pendapatan yang memiliki nilai ekonomi baik bagi pembangunan wilayah maupun bagi petani di Jawa Barat. Selain itu, pengembangan di subsektor peternakan memberikan kontribusi pada penyerapan jumlah tenaga kerja dan sebagai penghasil sumber pangan protein dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, maka sebagai upaya dalam merencanakan pembangunan khususnya di subsektor peternakan diperlukan adanya

kajian tentang kontribusi tenaga kerja sektor peternakan di Jawa Barat. Hal ini diperlukan guna melihat kinerja tenaga kerja yang bekerja di sektor peternakan. Analisis kontribusi tenaga kerja sektor peternakan di Jawa Barat menggunakan pendekatan model input-output untuk menganalisis kontribusi tenaga kerja di sektor peternakan.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; seberapa besar kontribusi tenaga kerja sektor peternakan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Provinsi Jawa Barat.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tenaga kerja sektor peternakan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Provinsi Jawa Barat.

## II TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan sering menjadi isu sentral baik bagi pemilihan pimpinan daerah ataupun negara. Hal ini terkait dengan bagaimana suatu wilayah bisa mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja di sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah. Apabila angka pengangguran di suatu wilayah sangat tinggi, maka dampak turunan yang terjadi adalah tingkat kejahatan semakin tinggi pula. Penekanan tingkat pengangguran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan atau program kerja pemerintah.

Terkait dengan penyediaan lapangan kerja, sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar, yaitu kurang lebih 40% tenaga kerja bisa terserap di sektor ini. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih tergolong sebagai negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai basis pekerjaan sebagian besar penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2005) menyebutkan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 39,066 juta jiwa di mana jumlah penduduk miskinnya mencapai 12,10% dan tingkat penganggurannya mencapai 13,69%. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua masyarakat Jawa Barat dapat menikmati kesejahteraan. Di samping itu pula dilaporkan juga bahwa tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 4,27% pada tahun 2003 dengan pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp 6,187 juta pertahun. Pendapatan perkapita tersebut termasuk pendapatan rata-rata dari seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan pendapatan perkapita yang tertinggi diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai 14,69% sedangkan sektor industri memberikan kontribusi sebesar 36,31%.

Data-data di atas menunjukkan indikator perekonomian di Jawa Barat yang masih tertinggal oleh provinsi besar lainnya. Bila kita melihat data tenaga kerja di Jawa Barat pada tahun 1996 sampai 1998, jumlah permintaan tenaga kerja masing-masing mencapai 120.574 orang, 130.744 orang, dan 108.778 orang (Departemen Tenaga Kerja, 2000). Akan tetapi yang berhasil ditempatkan atau diserap oleh lapangan kerja masing-masing sebesar 111.200 orang, 114.997 orang, dan 93.347 orang. Berdasarkan data tersebut maka masih terdapat tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar tenaga kerja. Hal ini akan menjadi masalah karena calon-calon tenaga kerja akan terus bermunculan dari dunia pendidikan yang telah menamatkan pendidikannya.

Di samping itu, permasalahan lainnya adalah minimnya upah regional di Jawa Barat. Data dari Departemen Tenaga Kerja (2000) melaporkan bahwa upah minimum regional di Jawa Barat terbagi ke dalam 4 wilayah, yaitu wilayah I UMRnya mencapai Rp 270.000/bulan, wilayah II UMRnya Rp 245.000/bulan, wilayah III UMRnya Rp 230.000/bulan, dan wilayah IV UMRnya Rp 225.000/bulan. Apabila dikaitkan dengan standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yaitu yang dikategorikan orang miskin adalah yang pengduaran perharinya US\$ 1 atau setara dengan Rp 10.000/hari (bila kurs rupiah terhadap dollar US sebesar US\$ 1 = Rp 10.000). Artinya satu bulan mencapai pengeluaran sebesar Rp 300.000. Ini membuktikan bahwa UMR

untuk regional Jawa Barat masih berada di bawah garis kemiskinan. Tentunya hal ini akan menambah permasalahan baru bagi Jawa Barat.

Namun tentunya, permasalahan tenaga kerja harus disikapi dengan cara meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang dapat padat karya dibandingkan dengan padat modal sehingga tenaga-tenaga kerja akan mampu diserap oleh sektor-sektor yang berpotensi tersebut. Pemerintah Jawa Barat seharusnya sudah harus mampu memproyeksikan sektor-sektor mana yang memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir melalui penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut.

### III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini mencakup perekonomian nasional secara keseluruhan dengan menekankan dampak tenaga kerja subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Barat. Dengan pertimbangan bahwa kontribusi tenaga kerja sektor peternakan memiliki peran yang cukup strategis dalam pembangunan Jawa Barat.

#### 3.2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini sebagian besar berasal dari tabel I-O Jawa Barat Tahun 2000 yang dihasilkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) setelah tabel I-O tahun 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, dan 1995. Untuk keperluan penelitian ini digunakan tabel dasar transaksi domestik atas dasar harga produsen klasifikasi 29 sektor yang kemudian diagregasi menjadi 9 sektor ditambah dengan 5 subsektor dari pertanian. Untuk mendukung analisis penelitian ini, juga digunakan data sekunder dari instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. Pengolahan dari data I-O ini menggunakan program Grim 6.0.

#### 3.3. Metode Analisis

##### a. Analisis Keterkaitan

Konsep keterkaitan yang biasa dirumuskan meliputi keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*). Keterkaitan ke belakang menunjukkan akibat suatu sektor terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian output sektor secara langsung perunit kenaikan permintaan total yang dirumuskan sebagai berikut:

$$F_i = \frac{\sum_{j=1}^n X_{ij}}{X_i} = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

$F_i$  = keterkaitan langsung ke depan

$X_{ij}$  = banyak output sektor i yang digunakan sektor ke j

$X_i$  = total output sektor i (antara dan akhir)

$a_{ij}$  = unsur matrik koefisien teknis

Sedangkan keterkaitan ke depan menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total.

$$B_i = \frac{\sum_{j=1}^n X_{ji}}{X_j} = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$



- $B_i$  = keterkaitan langsung ke belakang
- $X_{ij}$  = banyak output sektor j yang digunakan sektor ke i
- $X_j$  = total output sektor j (antara dan akhir)
- $a_{ij}$  = unsur matrik koefisien teknis

**b. Analisis Multiplier**

Secara sederhana prosedur matematis untuk menurunkan multiplier output, pendapatan, dan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 X_1 &= X_{11} + X_{12} + \dots + X_{1n} + Y_1 \\
 X_2 &= X_{21} + X_{22} + \dots + X_{2n} + Y_2 \\
 X_3 &= X_{n1} + X_{n2} + \dots + X_{nn} + Y_3 \dots \dots \dots (1)
 \end{aligned}$$

di mana:

- $X_i$  = Jumlah output total sektor I (jumlah total baris ke I)
- $X_{ij}$  = Jumlah output sektor i yang dibeli oleh sektor j
- $Y_j$  = Jumlah output total permintaan akhir untuk output sektor i

Dengan membagi setiap elemen pada setiap kolom tabel transaksi I-O dengan jumlah total setiap kolom akan diperoleh koefisien Input-Output ( $a_{ij}$ ) yang menunjukkan pembelian langsung setiap sektor antara untuk setiap peningkatan output total sebesar satu unit satuan moneter. Bila nilai  $a_{ij}$  tersebut dimasukkan ke dalam persamaan (1) maka model persamaannya menjadi:

$$\begin{aligned}
 X_1 &= a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1n}X_n + Y_1 \\
 X_2 &= a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2n}X_n + Y_2 \\
 X_n &= a_{n1}X_1 + a_{n2}X_{n2} + \dots + a_{ij}X_n + Y_n \dots \dots \dots (2)
 \end{aligned}$$

di mana:

$$a_{ij} = X_{ij}/X_j = \text{koefisien input-output}$$

Persamaan (2) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks:

$$X = AX + Y \dots \dots \dots (3)$$

di mana  $A = [a_{ij}]$ , adalah matriks koefisien input-output.

Persamaan (3) dilanjutkan :  $X - AX = Y \dots \dots \dots (4)$

$$X - (I-A) = Y \dots \dots \dots (5)$$

- Di mana:  $(I-A)$  = Matriks Leontif
- $(I-A)^{-1}$  = Matriks kebalikan Leontif

Dengan demikian, solusi umumnya dinyatakan dengan:

$$\begin{aligned}
 Z &= (I-A)^{-1} = [Z_{ij}] \text{ untuk model I-O terbuka} \\
 Z^* &= ((I-A)^{-1}) = [Z^*_{ij}] \text{ untuk model I-O tertutup}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan matrik kebalikan Leontif di atas, maka dalam analisis multiplier ini nilai-nilai dampak awal, efek putaran pertama, efek dukungan industri, efek induksi

konsumsi, efek total dan efek lanjutan baik dari sisi output, pendapatan, dan tenaga kerja dapat diperoleh. Sedangkan untuk melihat hubungan antara efek awal dan efek lanjutan per unit dari sisi pendapatan dan tenaga kerja, maka dihitung perbandingan/multiplier tipe I dan tipe II dengan rumus sebagai berikut:

Tipe IA = efek awal + efek putaran pertama / efek awal

Tipe IB = efek awal + efek dukungan industri / efek awal

Tipe IIA = (efek awal + efek putaran pertama + efek dukungan industri + efek ind. Kons)/ efek awal

Tipe IIB = efek lanjutan (*flow on*) / efek awal

Multiplier Tipe I dan II mengukur efek pendapatan yang disebabkan karena adanya perubahan pendapatan. Demikian juga multiplier tipe I dan tipe II dari sisi tenaga kerja mengukur efek ketenagakerjaan yang terjadi karena adanya perubahan tenaga kerja.

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Perekonomian Jawa Barat

Data tabel I-O tahun 2000 menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat mengalami defisit dalam transaksi perdagangan (antara impor dan ekspor) sebesar Rp 97,6 triliun. Di sisi pengeluaran, penggunaan dana untuk konsumsi menyedot dana terbesar, yakni sebesar 38,1 triliun. Berdasarkan hal tersebut, harus ada upaya peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggenjot sektor-sektor yang mempunyai basis ekspor serta meningkatkan sektor-sektor domestik yang potensial guna mengurangi impor terutama sektor yang berhubungan dengan konsumsi, seperti subsektor peternakan. Ke dua upaya tersebut dimaksudkan agar PDRB Jawa Barat dapat meningkat terutama peningkatan dari surplus usaha (lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat, Tahun 2000**

Pengeluaran	Jumlah (Rp Juta)	Pendapatan	Jumlah (Rp Juta)
Konsumsi	38.149.952	Upah Gaji	33.339.540
Modal	36.355.304	Surplus Usaha	65.708.312
Stok	62.938.460	Penyusutan	17.934.516
Pengeluaran Pemerintah	14.290.460	Pajak tidak langsung	21.091.012
Jumlah Permintaan Akhir	259.259.920	Subsidi	30.127.400
		Nilai Tambah Bruto	145.162.160
<b>Pengeluaran Kotor Regional</b>	<b>410.994.096</b>		
plus Ekspor less Impor	19.715.124 (117.346.280)		
<b>PDRB</b>	<b>313.362.940</b>	<b>PDRB</b>	<b>313.362.940</b>

Sumber: BPS Tahun 2000 (Diolah dari I-O Jawa Barat Tahun 2000)

Sebagai propinsi yang masih menitikberatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, sudah selayaknya fokus pembangunan dititikberatkan pada subsektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Jawa Barat. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan subsektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat dari tahun 1996 – 2000 memperlihatkan pertumbuhan yang meningkat, walaupun pada tahun 1997 dan 1998 mengalami penurunan kontribusi. Hal tersebut disebabkan kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berdampak pada seluruh sektor perekonomian secara nasional. Adapun subsektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Barat adalah subsektor tanaman pangan dan peternakan. Oleh karena itu, kedua subsektor pertanian tersebut menjadi subsektor unggulan di dalam pembangunan Jawa Barat (lihat Tabel 2)

**Tabel 2. Kontribusi Sektor dan Subsektor Pertanian terhadap PDRB Propinsi Jawa Barat**

Uraian	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
PDRB harga konstan (milyar Rp)	67.522.	71.164	58.848	60.671	63.150
Kontribusi Sektor Pertanian (%)	13.90	12.19	13.62	15.00	14.92
a. Tanaman Pangan	10.00	8.92	10.45	11.34	11.15
b. Perkebunan	0.93	0.78	0.72	0.97	0.93
c. Peternakan	2.04	1.58	1.45	1.59	1.72
d. Kehutanan	0.13	0.13	0.15	0.17	0.16
e. Perikanan	0.79	0.79	0.85	0.94	0.95

Sumber: diolah dari data BPS 1996-2000

#### **4.2. Gambaran Subsektor Peternakan di Propinsi Jawa Barat**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor unggulan di dalam menunjang program agribisnis yang telah dicanangkan oleh pemerintah Jawa Barat. Subsektor ini memberikan sumbangsih kebutuhan protein hewani bagi masyarakat berupa daging, susu, dan telur. Bila dibandingkan dengan tingkat norma gizi nasional, pencapaian norma gizi untuk produk daging dan telur baru mencapai di atas 50 persen dari norma gizi nasional sedangkan susu telah melebihi target norma gizi yang telah ditetapkan. Pencapaian norma gizi untuk produk susu ditunjang dengan potensi Jawa Barat sebagai daerah basis peternakan sapi perah di Indonesia.

Adapun data mengenai jumlah populasi ternak unggulan di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3. Pada tabel tersebut tampak bahwa populasi sapi perah tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Akan tetapi populasi terpadat terkonsentrasi di Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Penyebaran populasi ini disesuaikan dengan kondisi daerah yang sesuai dengan sapi perah. Seperti halnya dengan ternak sapi perah, penyebaran ternak sapi potong hampir merata di seluruh daerah di Jawa Barat. Namun yang menjadi daerah konsentrasi sapi potong yaitu di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang dan Sukabumi. Ternak lain yang menjadi unggulan di Jawa Barat dan bahkan telah melakukan ekspor ke mancanegar adalah produksi ayam ras pedaging. Penyebaran ternak ayam ras pedaging juga hampir merata di seluruh wilayah Jawa Barat, tetapi ada beberapa daerah yang menjadi daerah konsentrasi dari ternak ini, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis.

Jawa Barat dikenal sebagai pusat konsumen daripada sebagai sumber produsen hasil peternakan. Namun demikian, untuk sapi perah dan ayam ras pedaging potensi produksi Jawa Barat termasuk katagori produksi terbaik nasional. Misalnya, produksi susu sapi perah di Jawa Barat merupakan urutan ke dua setelah Jawa Timur sedangkan ayam pedaging menduduki peringkat pertama. Pada Tabel 5 diperlihatkan bahwa total produksi daging di Jawa Barat di dominasi oleh produksi ayam ras pedaging. Sedangkan daging yang berasal dari sapi potong baru mampu memberikan

kontribusinya terhadap kebutuhan daging sapi sekitar 11,08 %. Bagi komoditi susu di Jawa Barat, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekitar 1,62 % pertahun. Peningkatan produksi ini, di ingkat peternak terkendala oleh kualitas susu yang dihasilkannya. Apabila dilihat berdasarkan sasaran produksinya, bagi komoditi daging ternyata telah terlampaui pada tahun 2002. Khususnya bagi komoditi daging sapi kenaikannya sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan ayam ras pedaging. Sedangkan bagi komoditi susu, masih belum tercapai.

**Tabel 3. Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Sapi Perah (ekor)	Sapi potong (ekor)	Ayam Ras Pedaging (ekor)
1	Bogor	6.351	10.958	6.785.221
2	Kota Bogor	647	98	187.973
3	Kota Depok	586	737	554.656
4	Sukabumi	3.322	18.435	4.850.518
5	Kota Sukabumi	112	180	533.130
6	Cianjur	2.106	4.231	3.538.113
7	Indramayu	404	4.561	498.259
8	Cirebon	61	569	136.154
9	Kota Cirebon	5	0	24.518
10	Majalengka	514	6.183	797.266
11	Kuningan	5.956	7.849	574.181
12	Bekasi	19	16.857	672.902
13	Kota Bekasi	0	593	651.000
14	Karawang	13	5.991	1.979.220
15	Purwakarta	9	15.220	350.130
16	Subang	360	14.115	68
17	Bandung	41.777	4.172	3.480.036
18	Kota Bandung	583	0	102.834
19	Sumedang	4.711	29.394	1.685.000
20	Garut	20.562	3.787	438.044
21	Tasikmalaya	1.725	17.414	2.160.390
22	Ciamis	0	22.510	3.987.542
<b>Total</b>		<b>89.823</b>	<b>183.854</b>	<b>34.825.896</b>

*Sumber : Dinas Peternakan Prop. Jawa Barat, Tahun 2002*

#### 4.3. Peran Tenaga Kerja Sektor Peternakan terhadap Perekonomian Jawa Barat

Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang berhubungan penyediaan kebutuhan akan konsumsi protein hewani. Selain itu, subsektor ini cukup berperan dalam hal penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan bagi Jawa Barat. Untuk melihat lebih jauh kontribusi subsektor ini, telah dilakukan pengolahan data terhadap tabel I-O tahun 2000 Jawa Barat terhadap seluruh sektor perekonomian.

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, nilai output untuk subsektor peternakan adalah sebesar 5,2 triliun atau sebesar 1,14 persen dari seluruh output sektor perekonomian Jawa Barat. Sedangkan nilai output subsektor peternakan terhadap sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 8,4 persen atau menempati urutan ke dua

setelah subsektor tanaman pangan. Selain itu, hasil olahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja untuk subsektor peternakan pada tahun 2000 adalah sebanyak 1,12 juta orang atau 5,26 persen dari seluruh tenaga kerja yang digunakan oleh seluruh sektor perekonomian Jawa Barat. Penyerapan tenaga kerja di subsektor peternakan menempati urutan ke dua pada sektor pertanian dan menempati urutan ke enam dari seluruh sektor perekonomian di Jawa Barat. Hal ini dapat menjelaskan bahwa keberadaan subsektor peternakan dapat memberikan alternatif dalam penyerapan tenaga kerja. Namun bila dilihat dari tingkat output per tenaga kerja, subsektor peternakan hanya memberikan kontribusi sebesar 4,69 Juta Rupiah/Orang. Artinya bahwa setiap tenaga kerja yang berada di sektor ini memberikan sumbangan sebesar Rp 4,69 juta pada tahun 2000. Nilai output per tenaga kerja pada subsektor peternakan menempati urutan ke tiga dari seluruh subsektor pertanian.

**Tabel 4. Nilai Output dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian di Jawa Barat**

No	Sektor	Output (Rp Juta)		Tenaga Kerja (org)		Output/ Tenagakerja
		Nilai	%	Jumlah	%	
1	Pertanian	62688857	13.66	4865547	29.69	12.88
	a. Tanaman Pangan	48790496	10.63	1994874	12.17	24.46
	b. Perkebunan	2891586	0.63	437899	2.67	6.60
	c. Peternakan	5249110	1.14	1119076	6.83	4.69
	d. Kehutanan	530555	0.12	632521	3.86	0.84
	e. Perikanan	5227110	1.14	681177	4.16	7.67
2	Pertambangan dan Galian	26041536	5.68	95996	0.59	271.28
3	Industri	218251856	47.57	2835160	17.30	76.98
4	Listrik, Gas dan Air	11655630	2.54	51432	0.31	226.62
5	Bangunan/Konstruksi	20388004	4.44	788171	4.81	25.87
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	57031416	12.43	4091388	24.96	13.94
7	Transportasi dan Komunikasi	20442510	4.46	1282488	7.82	15.94
8	Keuangan, usaha bangunan dan Jasa Perusahaan	11845869	2.58	107413	0.66	110.28
9	Jasa-jasa	30482576	6.64	2272831	13.87	13.41
	<b>Total</b>	<b>458828254</b>	<b>100.00</b>	<b>16390426</b>	<b>100.00</b>	24.54

Sumber: Tabel I-O Jawa Barat Tahun 2000 (diolah)

Berdasarkan analisis tersebut di atas, peran subsektor peternakan masih relatif kecil dibandingkan dengan seluruh sektor perekonomian yang ada di Jawa Barat. Walaupun demikian dari sisi penyerapan tenaga kerja, subsektor ini memberikan peluang usaha bagi penduduk Jawa Barat. Di samping itu, subsektor ini masih dijadikan sebagai usaha sampingan bagi petani kecuali komoditas-komoditas tertentu, seperti sapi perah dan ayam ras pedaging telah menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga peternak bukan sebagai usaha sampingan lagi.

Adapun gambaran perekonomian Jawa Barat ditinjau dari sisi nilai tambah, nilai upah, dan transaksi perdagangan dapat dilihat pada Tabel 5. Bila kita simak seluruh

sektor perekonomian di Jawa Barat, yang memberikan nilai tambah pendapatan yang cukup besar adalah sektor industri dan diikuti oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Subsektor pertanian yang memberikan nilai tambah yang besar terhadap sektor pertanian adalah subsektor tanaman pangan sedangkan subsektor peternakan memberikan nilai tambah pendapatan urutan kedua dengan nilai tambah sebesar Rp 4,42 triliun.

**Tabel 5. Nilai Tambah, Nilai Upah, dan Transaksi Perdagangan (Ekspor-Import) Menurut Sektor**

Sektor	Nilai Tambah (Rp juta)		Nilai Upah (Rp juta)		Transaksi Perdagangan (Rp Juta)		
	Nilai	%	Nilai	%	Ekspor	Impor	Selisih (X-M)
1. Pertanian	52921540	16.89	4660297	13.98	360	2497667	-2497307
a. Tanaman Pangan	42006296	13.40	3450225	10.35	0	1865399	-1865399
b. Perkebunan	2676112	0.85	408633	1.23	277	58069	-57792
c. Peternakan	4424392	1.41	468370	1.40	83	146950	-146867
d. Kehutanan	483300	0.15	42250	0.13	0	12448	-12448
e. Perikanan	3331440	1.06	290819	0.87	0	414801	-414801
2. Pertambangan dan Galian	22312560	7.12	586298	1.76	0	0	0
3. Industri	120509616	38.46	4430516	13.29	553956	0	553956
4. Listrik, Gas dan Air	7082304	2.26	960954	2.88	301781	0	301781
5. Bangunan/ Konstruksi	10635532	3.39	2847880	8.54	634780	2011438	-1376658
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	47224704	15.07	5453932	16.36	283133	0	283133
7. Transportasi & Komunikasi	14621386	4.67	2015583	6.05	322627	0	322627
8. Keuangan, usaha bangunan dan Jasa Perusahaan	10047036	3.21	1052706	3.16	116059	0	116059
9. Jasa-jasa	28008260	8.94	11331375	33.99	9456229	192569	9263660
<b>Total</b>	<b>313362938</b>	<b>100.00</b>	<b>33339541</b>	<b>100.00</b>	<b>11668925</b>	<b>4701674</b>	<b>6967251</b>

Sumber: Tabel I-O Jawa Barat Tahun 2000 (diolah)

Jika dilihat dari nilai upah yang dikeluarkan oleh seluruh sektor perekonomian di Jawa Barat, maka yang terbesar yang mengeluarkan upah berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran disusul oleh sektor pertanian dan sektor industri. Nilai upah yang dikeluarkan subsektor peternakan sebesar Rp 468 milyar dan merupakan nilai upah terbesar ke dua setelah tanaman pangan dari sektor pertanian. Jika kita kaitkan antara tenaga kerja yang diserap oleh subsektor peternakan dengan upah yang dikeluarkan oleh subsektor peternakan, maka tingkat upah yang diberikan oleh subsektor ini adalah sebesar Rp 418.532,79 per orang per tahun atau sebesar Rp 34.877,73 per orang per bulan. Berdasarkan indikasi ini dapat dibuktikan bahwa upah yang dikeluarkan oleh subsektor ini masih relatif kecil sebagai upaya peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan transaksi perdagangan seluruh sektor perekonomian Jawa Barat mengalami surplus perdagangan. Artinya adalah total ekspor yang dikeluarkan melebihi impor yang dibutuhkan oleh seluruh sektor perekonomian oleh Propinsi Jawa Barat. Sektor-sektor yang mengalami surplus perdagangan adalah sektor jasa-jasa; industri; keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan; perdagangan, hotel dan restoran; transportasi dan komunikasi; serta listrik, gas, dan air. Adapun sektor pertanian dan seluruh subsektornya mengalami defisit perdagangan, termasuk subsektor peternakan. Hal ini dapat membuktikan bahwa guna memproduksi hasil dari sektor pertanian diperlukan berbagai input produksi yang harus didatangkan dari luar negeri. Artinya komponen impor masih lebih banyak digunakan oleh sektor pertanian dibandingkan dengan komponen lokal.



## V Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan sektor peternakan dalam penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan cukup besar yaitu mampu menyerap tenaga kerja sebesar 6,83% dari total keseluruhan tenaga kerja Jawa Barat. Akan tetapi, nilai kinerja berupa output per tenaga kerja yang dihasilkan oleh sektor ini relatif masih kecil, yaitu sebesar 4,69%.

### 5.2. Saran

Dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor peternakan, maka perlu diupayakan dorongan investasi baik swasta domestik ataupun asing untuk menanamkan modalnya disektor peternakan sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 2000. Tabel Input-Output Jawa Barat Tahun 2000. Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. Bandung.
- Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. 1999. Buku Statistik Peternakan Tahun 1999. Direktorat Jenderal Peternakan Republik Indonesia dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Jakarta.
- Esmara, Hendra. 1993. Perencanaan Pembangunan. Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jensen, R.C and G.R. West. 1988. Input-Output for Practitioners: Theory and Application. Australian Government Publishing Service. Canberra.
- Masjidi Siregar. 1993. Income and Employment Impacts of Indonesian Agricultural Sectors. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLI No. 4. Jakarta.
- Miller, R.E and Blair. P.D. 1985. Input-Output Analysis: Foundation and Extention. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Tjandrawan, Iwan. 1994. Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Nasional (Analisis Input-Output). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor